



LAPORAN KEUANGAN MODUL GLP DAN PELAPORAN

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG
SEMESTER II (AUDITED) TAHUN 2025





Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi	21
C. Penjelasan Atas-Pos-pos neraca	29
D. Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional	52
E. Penjelasan atas Perubahan laporan perubahan ekuitas	59
VI. Lampiran dan Daftar	70





Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang Periode **Audited TA 2025** ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Posisi **31 Desember 2025** adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp83.352.000,00** atau mencapai **116,9 persen** dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp71.275.000,00**

Realisasi Belanja Negara pada Posisi Periode **Audited TA 2025** adalah sebesar **Rp5.240.368.818,00,-** atau mencapai **95,21 persen** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp5.504.122.000,00**

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Posisi **31 Desember 2025**. Nilai Aset per Posisi Tahunan **31 Desember 2025** dicatat dan disajikan sebesar **Rp8.374.452.430,00** yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar **Rp86.501.025,00**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp8.287.951.405,00**; dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp0,00**

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp8.360.606.440,00**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos

luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan Posisi Periode **Audited TA 2025** adalah sebesar **Rp(5.419.037.847,00)** sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp5.497.967.847,00** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp(5.419.037.847,00)** Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp(0,00)** dan sebesar **Rp(0,00)**, serta Surplus/deficit Pelapasan asset Non Lancar sebesar **Rp0,00** dan sebesar **Rp.0,00** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp(5.419.037.847,00)**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar **Rp11.287.439.299,00** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp(5.419.037.847,00)**. ditambah dengan koreksi nilai persediaan senilai **Rp250.000,00**, koreksi atas reklasifikasi aset tetap senilai **Rp437.500,00** Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi senilai **Rp(187.500,00)**, Lain-lain **Rp.0,00** dan Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp2.491.954.988,00,-** sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal Periode **Audited TA 2025** adalah senilai **Rp8.360.606.440,00**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal **31 Desember 2025**, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk **31 Desember 2025** disusun dan disajikan dengan basis akrual.



Laporan Realisasi Anggaran

**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG**
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025		% thd Angg	31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	71.275.000	83.352.000	116,9	74.012.725
JUMLAH PENDAPATAN		71.275.000	83.352.000	116,9	74.012.725
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	3.515.359.000	3.490.390.685	99,29	3.476.364.491
Belanja Barang	B.4	1.988.763.000	1.749.978.133	87,99	2.128.006.551
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		5.504.122.000	5.240.368.818	95,21	5.604.371.042



Neraca

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG NERACA PERIODE 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Piutang dari KUN	C.5	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	86.501.025	86.980.454
Jumlah Aset Lancar		86.501.025	86.980.454
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	4.554.414.000	6.261.306.000
Peralatan dan Mesin	C.15	5.199.489.138	5.045.918.638
Gedung dan Bangunan	C.16	4.194.487.000	5.355.361.197
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	226.696.000	349.141.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	94.595.500	94.595.500
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(5.981.730.233)	(5.891.552.507)
Jumlah Aset Tetap		8.287.951.405	11.214.769.828
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		8.374.452.430	11.301.750.282
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	0	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	13.845.990	14.310.983
Utang yang belum ditagihkan	C.26	0	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		13.845.990	14.310.983
JUMLAH KEWAJIBAN		13.845.990	14.310.983
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	8.360.606.440	11.287.439.299
JUMLAH EKUITAS		8.360.606.440	11.287.439.299
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8.374.452.430	11.301.750.282



Laporan Operasional

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG LAPORAN OPERASIONAL PERIODE 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	83.325.000	72.330.000
JUMLAH PENDAPATAN		83.325.000	72.330.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.490.390.685	3.476.364.491
Beban Persediaan	D.3	202.045.569	137.958.026
Beban Barang dan Jasa	D.4	956.771.259	1.033.493.841
Beban Pemeliharaan	D.5	559.718.785	540.410.368
Beban Perjalanan Dinas	D.6	52.747.601	378.818.548
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	236.293.948	340.616.398
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		5.497.967.847	5.907.661.672
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.414.615.847)	(5.835.331.672)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Operasional		-	(21.054.500)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/defisit dari keg non operasional lainnya		(4.422.000)	762.225
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	762.225
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		4.422.000	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(4.422.000)	(20.292.275)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(5.419.037.847)	(5.855.623.947)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(5.419.037.847)	(5.855.623.947)



Laporan Perubahan Ekuitas

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PERIODE 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
EKUITAS AWAL	E.1	11.287.439.299	11.538.224.429
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5.419.037.847)	(5.123.339.088)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	250.000	(4.187.505)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	437.500	(2.890.626)
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	(187.500)	(1.296.879)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	0	0
JUMLAH		500.000	120.940
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.491.954.988	5.609.028.322
EKUITAS AKHIR	E.5	8.360.606.440	11.287.439.299





Catatan Atas Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum
entitas dan
rencana
strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan Raya Asnawi Mangku Alam Palembang provinsi Sumatera Selatan. Kemudian dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.Per 92/MEN/2020 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang berubah nama menjadi Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang sesuai dengan Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PERMEN-KP NO. 92 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia, Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya di lakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PERMEN-KP NO. 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.

MOTTO :

Stasiun KIPM Palembang yaitu : **C E P A T** “ Cakap, Efisien, Pasti, Akuntabel, dan Transpaaran”

Untuk mewujudkan tujuan diatas Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang berkomitmen dengan :

VISI:

Menjadi Lembaga Pelayanan Publik, Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kalutan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

MISI :

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sesuai Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Penigkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

TUJUAN :

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, yakni :
 - a. Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat
 - b. Inovasi dan Riset KP menguat
2. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni :
 - a. Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal.
 - b. Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat.
 - c. Pengawasan pengelolaan SDKP.
 - d. Sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat.
 - e. Pengelolaan ruang laut optimal.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP, yakni :

Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, Yakni :

Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang Mempunyai pegawai sebanyak 33 (tiga puluh tiga), meliputi : Kepala UPT, Kepala Urusan Umum, Fungsional Tertentu sebanyak 14 pegawai, Fungsional Umum sebanyak 7 pegawai serta PPNNP sebanyak 9 orang.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode Tahunan **31 Desember 2025** ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh **Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang**. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan **Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang** dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

Aset

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Periode **31 Desember 2025** telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor **Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang**. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor **Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang** adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan

oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan negara, Kementerian keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Nilai aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset
Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

a. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, **Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang** telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 11 Kali Revisi.

Rekapitulasi Revisi DIPA Selama Periode 31 Desember 2025 :

No	Uraian	Tanggal Revisi	Alasan Revisi
1	Data Awal	2 Desember 2024	-
2	Revisi Ke-1	4 Februari 2025	Revisi Rencana Penarikan/Halaman III DIPA
3	Revisi Ke-2	21 Februari 2025	Revisi blokir Efisiensi Anggaran
4	Revisi Ke-3	16 April 2025	Revisi relaksasi (buka blokir) anggaran
5	Revisi Ke-4	15 Mei 2025	Revisi Rencana Penarikan/Halaman III DIPA
6	Revisi Ke-5	09 Juli 2025	Halaman III DIPA
7	Revisi Ke-6	28 Agustus 2025	Revisi Rencana Penarikan/Halaman III DIPA
8	Revisi Ke-7	08 Oktober 2025	Halaman III DIPA
9	Revisi Ke-8	15 Oktober 2025	Revisi Rencana Penarikan/Halaman III DIPA
10	Revisi Ke-9	18 November 2025	Revisi Rencana Penarikan/Halaman III DIPA
11	Revisi Ke -10	12 Desember 2025	Halaman III DIPA

Uraian	31 Desember 2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan Negara dan Hibah		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	71.275.000	71.275.000
Penrimaan Hibah	0	-
Jumlah Pendapatan	71.275.000	71.275.000
Belanja		
Belanja Pegawai	3.515.359.000	3.515.359.000
Belanja Barang	2.305.049.000	2.305.049.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	5.762.767.000	5.762.767.000

B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada **31 Desember 2025** adalah sebesar **Rp83.352.000,00** atau mencapai 116,9 persen dari

estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp71.275.000,00** PNBP Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang terdiri dari PNBP Jasa dan PNBP Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	71.275.000	83.352.000	116,9
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	-	
Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL	-	0	
Penerimaan Kembali Belanja Barang TA yang lalu		0	
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	0	-
Jumlah	71.275.000	83.352.000	116,9

Realisasi Pendapatan Jasa Periode **Audated 2025** mengalami kenaikan sebesar **(49,34)** persen dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh ada tidak adanya pemungutan domestik yang keluar Sensor Karantina dan Pemeriksaan/Pengawasan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang tidak banyak pengiriman. Pada Periode **Audated 2025** terdapat Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp83.352.000,00** itu terdiri dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya senilai Rp0,00 dan Penerimaan kembali Belanja Barang TA yang lalu (425912) senilai Rp0,00.

*Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya	83.352.000	74.012.725	37
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	0	
Pendapatan Belanja Pegawai TAYL	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	0	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Jumlah	83.352.000	74.012.725	37

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara
Rp5.240.368.260,00

Realisasi Belanja instansi pada **31 Desember 2025** adalah sebesar **Rp5.240.368.260,00** atau **95.21 %** dari anggaran belanja sebesar **Rp5.504.122.000,00**

Rincian anggaran dan realisasi belanja **31 Desember 2025** adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode Audated 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.515.359.000	3.490.390.685	99.29
Belanja Barang	1.988.763.000	1.749.978.133	87,99
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	5.504.122.000	5.240.368.818	95.21
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	5.504.122.000	5.240.368.818	95.21

Dibandingkan dengan 31 Desember 2024, Realisasi Belanja periode **31 Desember 2025** mengalami kenaikan sebesar 0.02 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Realisasi Belanja Pegawai lebih besar di bandingkan dengan tahun 2025 dikarenakan adanya penggabungan UPT;
2. Anggaran belanja barang lebih kecil dibandingkan dengan Tahun 2024;
3. Tidak ada nya belanja modal TA 2025.

Perbandingan Realialisasi Belanja **31 Desember 2025** Dan 31 Desember 2024

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.490.390.685	3.476.364.491	96.86
Belanja Barang	1.749.978.133	2.128.006.551	92.58
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	5.504.122.000	5.604.371.042	

Belanja Pegawai
Rp2.588.010.072,00



B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai **31 Desember 2025** dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.588.010.072,00 dan Rp2.606.237.683,00 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja **31 Desember 2025** mengalami penurunan sebesar 12 persen dari 31 Desember 2024, Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja pegawai mengalami penurunan dikarenakan ada nya kenaikan tunjangan kinerja pegawai dan gaji ke 13 menjadi 100% pembayarannya..

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.588.010.072	2.606.237.683	12
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS			-
Belanja Honorarium			-
Belanja Lembur	126.346.000	103.651.000	21,90
Belanja Tunjangan Kinerja	2.013.495.314	1.487.455.267	35,37
Jumlah Belanja Kotor	4.376.730.695	3.349.243.056	30,68
Pengembalian Belanja Pegawai	(555.240)	(370.456)	-
Jumlah Belanja	4.376.175.455	3.348.872.600	30,68

Belanja Barang
Rp1.759.754.158,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar Rp1.759.754.158,00 dan Rp1.367.693.288,00 Realisasi Belanja Barang **31 Desember 2025** mengalami kenaikan sebesar 28,45 % dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024. Hal ini antara lain disebabkan nilai pagu anggaran bertambah dikarena adanya penggabungan UPT.



Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	649.304.584	320.250.051	102,75
Belanja Barang Non Operasional	59.873.000	29.148.042	105,41
Belanja Jasa	569.649.981	422.604.455	34,80
Belanja Pemeliharaan	334.866.997	250.144.746	33,87
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	90.894.920	219.091.825	(58,51)
Belanja Barang Persediaan bahan Baku dan Konsumsi	52.164.676	126.454.169	(58,75)
Jumlah Belanja Kotor	1.756.754.158	1.367.693.288	28,45
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	1.756.754.158	1.367.693.288	28,45

Belanja Modal Rp0,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar **Rp0,00 dan Rp0,00** Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tidak Terdapat realisasi belanja modal periode **31 Desember 2025**.

.Realisasi Belanja Modal pada **31 Desember 2025** terdapat realisasi dibandingkan dengan anggaran Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Belanja Modal Tanah
Rp0,-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak Terdapat realisasi belanja modal tanah periode **31 Desember 2025**.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Pengurangan Tanah	0	0	100,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp0,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar **Rp0,00 dan Rp0,00**. Periode **31 Desember 2025 Tidak** terdapat realisasi anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	Naik (Turun) %
Alat Kantor	0	0	
Alat Rumah Tangga	0	0	
Alat Studio	0		#DIV/0!
Alat Komunikasi	0		#DIV/0!
Unit Alat Laboratorium	0	0	#DIV/0!
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0		#DIV/0!
Komputer Unit	0		#DIV/0!
Alat Laboratorium Fisika/elektronika	0		#DIV/0!
Peralatan Komputer	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	#DIV/0!

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal **31 Desember 2025** dan **30 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak Terdapat Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Untuk Periode TA 2025 dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024..

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Periode **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	0	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal
Jalan,Irigasi dan
Jaringan Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Periode Laporan **31 Desember 2025** ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Periode **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 30 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
NIHIL	0	0	#DIV/0!
	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	0	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Belanja Modal lainnya
Rp0,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Periode Laporan **31 Desember 2025** ini.

Belanja Bantuan Sosial
Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Pelaporan Periode **31 Desember 2025** ini.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Aset Lancar
Rp111.441.120

Jumlah Aset Lancar Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang per **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** masing-masing adalah sebesar Rp111.441.120,00 dan Rp101.095.354,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai Aset lancar merupakan Aset Piutang Bukan Pajak, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak, Persediaan Bahan Baku Laboratorium dan Barang Konsumsi. Aset Lancar ini terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran Senilai Rp.300.000,00 dan Persediaan Periode 31 Desember 2025 Senilai Rp81.441.120,00.

Rincian Aset Lancar 31 Desember 2025 :

Keterangan	Realisasi 30 September 2025	Realisasi 31 Desember 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	30.000.000	0
Piutang Bukan Pajak	0	0
Belanja Modal BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	0	0
Piutang Bukan Pajak (Netto)	0	0
Persediaan	81.441.120	41.095.354
Jumlah	111.441.120	41.095.354

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp30.000.000
,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang per **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** masing-masing adalah sebesar Rp30.000.000,00 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran :

Keterangan	Realisasi 30 September 2025	Realisasi 31 Desember 2024
Uang Tunai berupa Kwitansi UP yang belum di SPM kan	16.133.408	0
Uang Tunai di Brangkas	0	
Rekening VA Bendahara Pengeluaran	12.047.500	0
Jumlah	28.180.908	0

Kas di Bendahara Pengeluaran ini Uang Tunai berupa Kuitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp16.133.408,00 dan berupa Saldo Bank berada di Rekening VA Bendahara Pengeluaran dengan Nomor Rekening 650956497321000 atas nama (BPG 024 STASIUN KARANTINA IKAN PMDKHP KELAS II PALEMBANG) sebesar Rp.12.047.500,00

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024
	0	0
	0	0
Jumlah	0	0

Bendahara Penerimaan tidak mempunyai Rekening Penerimaan, dikarenakan Pengguna Jasa sudah menyetorkan langsung ke Kas Negara.

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Jumlah	0	0

Untuk Periode **31 Desember 2025** Stasiun KIPM Palembang tidak terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas senilai **Rp0,00**

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak
Rp0,00

Saldo Piutang PNPB per tanggal **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang PNPB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Untuk Periode **31 Desember 2025** Stasiun KIPM Palembang Tidak terdapat Piutang Bukan Pajak

Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR
Rp0.00

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak ada Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada periode **31 Desember 2025** maupun 31 Desember 2024 pada Stasiun KIPM Palembang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar TPA
Rp.0,00

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak ada Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada Stasiun KIPM Palembang pada Periode Palaporan **31 Desember 2025**.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Bukan Pajak
Rp0,00

C.1.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek periode **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertahiran piutang bukan pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-piutang bukan pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Bukan Pajak	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,50%	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

C.1.8. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka
Rp0,00

Saldo Belanja Dibayar di Muka periode **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	30 September 2025	31 Desember 2024
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang per **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Jasa Perikanan	-	-
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Jumlah	-	-

C.1.10. Persediaan

Nilai Persediaan per **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** masing-masing adalah sebesar **Rp81.441.120,00 dan Rp41.095.384,00**

Persediaan

Rp81.441.120,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	14.787.409	17.704.335
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	388.500	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Bahan Baku	58.045.082	77.893.630
Jumlah	73.220.991	95.597.965

Saldo Persediaan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang per **31 Desember 2025** sebesar **Rp73.220.991,00** jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp95.597.965,00 total mutasi berkurang sebesar Rp(39.109.976),00 *Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :*

Akun	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	17.704.335	(2.916.926)	14.787.409
117112	Amunisi	-	-	-
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
117114	Suku Cadang	-	388.500	388.500
117121	Pita Cukai, Materai dan Legas	-	-	-
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
117131	Bahan Baku	77.893.630	(19.848.548)	58.045.082
117191	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-	-
117199	Persediaan Lainnya	-	-	-
TOTAL		95.597.965	(22.376.974)	73.220.991

Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan opname fisik sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Nomor : B.269 /SKIPM.PLG/PL.520/IX/2025 Tanggal 31 Desember 2025 dengan nilai sebesar Rp73.220.991,00 Penjelasan rincian persediaan Stasiun KIPM Palembang adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian Akun	Per 30 September 2025	Keterangan
117111	Barang Konsumsi	14.787.409	terdiri dari Penjepit Kertas, Buku Tulis, Ordner dan Map, Cutter, alat tulis kantor lainnya, Kertas HVS, Amplop, Kop Surat dan barang cetakan dll
117112	Amunisi	-	-
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-
117114	Suku Cadang	388.500	berupa glassware
117121	Pita Cukai, Materai dan Legas	-	-
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	-
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-
117131	Bahan Baku	58.045.082	terdiri dari: Bahan Laboratorium berupa bahan kimia padat, bahan kimia cair, Bahan Kimia Lainnya dan Bahan Lainnya
117191	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-
117199	Persediaan Lainnya	-	-
TOTAL		73.220.991	-

Stasiun KIPM Palembang tidak memiliki barang persediaan dalam kondisi rusak maupun usang sampai dengan akhir periode **31 Desember 2025**.

Periode **31 Desember 2025** Untuk transaksi Persediaan adalah dari Pembelian, dan Transfer Masuk dari Sekertariat BPPMHKP berupa Sertifikat HC.

Pencatatan Sertifikat HC

Stasiun KIPM Palembang telah melakukan pencatatan health sertificate (HC) dengan satuan eksemplar dan setiap sertifikat kesehatan yang telah diterima oleh Stasiun KIPM Palembang baik dari UPT Pusat maupun kantor daerah lingkup BPPMHKP telah tercatat di aplikasi persediaan.

Pencatatan Bahan Laboratorium

Persediaan Bahan Baku (Bahan Laboratorium) :

Hasil Stock Opname Fisik Persediaan Bahan Laboratorium Kemasan utuh dan sisa bahan kemasan yang sudah terbuka dengan rincian sebagai berikut :

1. Stock persediaan yang masih tersisa di gudang/tempat penyimpanan (kemasan utuh) dilaporkan dalam posisi Persediaan pada Neraca. Satuan yang digunakan sebagai dasar pelaporan adalah kemasan terkecil seperti botol, pak dan kemasan lainnya.
2. Sisa persediaan yang sudah berada pada unit pemakai (kemasan yang sudah terbuka) adalah sisa Persediaan yang masih bisa digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satker, namun tidak dilaporkan dalam posisi Persediaan pada Neraca satuan kerja disebabkan aplikasi persediaan tidak dapat mengimplementasikan nilai desimal baik untuk kuantitas maupun harga satuan. Satuan yang digunakan dalam pemakaian di unit pemakai adalah gram, miligram, disc, buah, reaksi, mikroliter dan ampul.

Aset Tetap

Rp.8.381.901.776,00

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang per **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** masing-masing adalah sebesar Rp8.381.901.776,00 dan Rp11.319.802.349,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah

Rp4.554.414.000,00

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Stasiun KIPM Palembang periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah sebesar Rp4.554.414.000,00 dan Rp6.261.306.000,00. Tidak Terdapat koreksi nilai dan kuantitas pada periode 31 Desember 2025, Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	6.261.306.000
Mutasi tambah:	0
Revaluasi Aset	0
Mutasi kurang:	1.706.892.000
Koreksi Perubahan Nilai Berkurang	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 September 2025	4.554.414.000

Rincian saldo Tanah periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah :

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	847 m2	Jl. Asnawi Mangku Alam Palembang	2.044.771.000
2	590 m2	Jl. Asnawi Mangku Alam Palembang	1.413.687.000
3.	541 m2	Jl. Karantina	1.095.956.000
Jumlah			4.554.414.000

Penjelasan Analisis Vertikal dan Horizontal Terkait Tanah :

Uraian	Nilai
Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025	-
Penambahan (kenaikan)	0
Saldo Aset Tanah Per 30 September 2025	4.554.414.000
Saldo Aset Tanah Per 31 Desember 2024 (Saldo Awal 2024)	6.261.306.000
Selisih	1.706.892.000
Klarifikasi Selisih	Nilai
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-
Transfer keluar dari SKIPM Palembang ke sateker PSDKP Batam	1.706.892.000
Saldo KDP Per 31 Desember 2025	-
Jumlah Klarifikasi Selisih	1.706.892.000

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp5.199.489.138,00

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah Rp5.199.489.138,00 dan Rp5.425.837.433,00

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	5.425.837.433
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	
Transfer Keluar dari Stasiun KIPM Palembang ke Sateker PSDKP Batam	6.729.500
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya	-
Saldo per 31 Desember 2025	5.199.489.138
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-5.888.804.862
Nilai Buku per 31 Desember 2025	8.382.651.776

Mutasi Keluar berupa Transfer Keluar Peralatan dan Mesin dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang ke Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam senilai Rp. 2.9996.940.697,00 berdasarkan BAST Nomor : B.440/SKIPM.PLG/PL.450/VIII/2025 Tanggal 15 Agustus 2025, BAST Terlampir.

Mutasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin antara lain berupa Akumulasi Penyusutan senilai Rp.(-5.888.804.862,00)

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan akumulasi penyusutan per 30 September 2025 disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Penjelasan Analisis Vertikal dan Horizontal Terkait Aset Peralatan dan Mesin :

Uraian	Nilai
Realisasi Belanja Modal Alsin Tahun 2025	-
Penambahan (Kenaikan)	0
Saldo Aset Peralatan dan Mesin Per 30 September 2025	4.554.414.000
Saldo Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Des 2024 (Saldo Awal 2025)	5.425.837.433
Selisih	871.423.433
Klarifikasi Selisih	Nilai
Koreksi Saldo Awal	-
Transfer Keluar dari SKIPM Palembang ke Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.998.940.697
Reklasifikasi Masuk Berupa Micro Bus	-
Transfer Masuk Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 Kijang LGX dari Setban BPPMHKP	-
Reklasifikasi Masuk Berupa Kursi Besi Metal	-
Transfer Keluar Berupa Aset Peralatan dan Mesin ke BKHIT Jawa Barat	-
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi Pencatatan	-
Usulan Barang Hilang ke Pengelola	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan/Penghapusan	-
Pembelian Ekstrakomtabel	-
Saldo KDP Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024	-
Jumlah Klarifikasi Selisih	2.998.940.697

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp4.319.620.701,00

Nilai Gedung dan Bangunan periode (Audated) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp4.194.487.000,00 dan Rp1.889.354.000,00 terdapat mutasi dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	5.355.361.197
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	-
Transfer keluar	-
Saldo per 30 September 2025	4.194.487.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2025	(780.036.138)
Nilai Buku per 30 September 2025	3.414.450.862

Status Gedung dan Bangunan sudah ber IMB.

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 30 September 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Penjelasan Analisis Vertikal dan Horizontal Terkait Aset Gedung dan Bangunan:

Uraian	Nilai
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025	-
Penambahan Nilai (Pemasangan PDAM)	-
Saldo Aset Gedung Per 30 September 2025	3.414.450.862
Saldo Aset Gedung Per 31 Desember 2024 (Saldo Awal 2025)	4.479.413.636
Selisih	1.064.962.774
Klarifikasi Selisih	Nilai
Transfer Masuk dari SKIPM Bandung sebagai Anak Satker	0
Transfer Keluar ke Pengawasan Sumber Daya Kelutan dan Perikanan (PSDKP) Batam	1.283.319.197
Pengembalian Belanja Modal Gedung TAYL	-
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	-
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-
Penambahan Perolehan KDP Jasa Konsultan Perencanaan Stasiun KIPM Palembang	-
Saldo KDP Per 30 September 2025	-
Jumlah Klarifikasi Selisih	2.430.466.701

Mutasi Berkurang berupa Transfer Keluar dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang senilai Rp.1.283.319.197,00 berdasarkan BAST Nomor : B.440/SKIPM.PLG/PL.450/VIII/2025 Tanggal 15 Agustus 2025, BAST Terlampir.

Mutasi Kurang aset Gedung dan Bangunan berupa Akumulasi Penyusutan senilai Rp(780.036.138)

C.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp197.879.014,00

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan periode (*Audated*) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar Rp78.459.999,00 dan Rp126.764.918,00 Pada periode **30 September 2025** Tidak ada Transaksi penambahan Jalan,Irigasi dan Jaringan, Berikut Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	349.141.000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	0
Koreksi Pencatatan Hasil penilaian kembali	-
Saldo per 30 September 2025	226.696.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2025	(148.236.001)
Nilai Buku per 30 September 2025	143.422.304

Mutasi Tambah tidak ada mutasi tambah aset jalan, irigasi dan jaringan pada Stasiun KIPM Palembang

Mutasi Kurang aset jalan, irigasi dan jembatan berupa Akumulasi Penyusutan senilai Rp(148.236.001)

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Penjelasan Analisis Vertikal dan Horizontal Terkait Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan:

Uraian	Nilai
Realisasi Belanja Modal JIJ Tahun 2025	-
Penambahan (Kenaikan)	0
Saldo Aset JIJ Per 30 September 2025	78.459.999,00
Saldo Aset JIJ Per 31 Desember 2024 (Saldo Awal 2025)	126.764.918,00
Selisih	65.695.081
Klarifikasi Selisih	Nilai
Reklasifikasi Keluar	-
Transfer Masuk	0
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Jumlah Klarifikasi Selisih	-

Aset Tetap Lainnya
Rp32.290.000,00

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah Rp32.290.000,00 dan Rp32.290.000,00 Aset tetap tersebut berupa Buku-buku perpustakaan. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk periode **30 September 2025**. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	32.290.000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 September 2025	32.290.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2025	0
Nilai Buku per 30 September 2025	32.290.000

Penjelasan Analisis Vertikal dan Horizontal Terkait Aset Tetap Lainnya:

Uraian	Nilai
Realisasi Belanja Modal ATL Tahun 2025	-
Penambahan (Penurunan)	-
Saldo Aset ATL Per 30 September 2025	32.290.000
Saldo Aset ATL Per 31 Desember 2024 (Saldo Awal 2025)	32.290.000
Selisih	-
Klarifikasi Selisih	Nilai
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Jumlah Klarifikasi Selisih	-

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Tidak terdapat Saldo Konstruksi Dalam pengerjaan pada periode 30 September 2025.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap
Rp(5.888.804.862,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing Rp(5.888.804.862,00) dan Rp(6.256.827.3811,00) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode **30 September 2025** adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5.201.204.138	4.960.532.723	240.671.415
2	Gedung dan Bangunan	4.194.487.000	780.036.138	3.414.450.862
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	226.696.000	148.236.001	78.459.999
4	Aset Tetap Lainnya	94.595.500	0	94.595.500
Akumulasi Penyusutan		9.716.982.638	5.888.804.862	3.828.177.776

C.3 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang
Rp0,00

Piutang Jangka Panjang Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang per (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp0,00

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang per (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2025 dan 2024

No	Uraian	30 September 2025	31 Desember 2024
1	NIHIL	-	-
2		-	-
	Jumlah	-	-

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0,00

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal (Audated) **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar Rp0,00. dan Rp0,00, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran 2025 dan 2024

No	Uraian	30 September 2025	31 Desember 2024
1	NIHIL	-	-
2		-	-
	Jumlah	-	-

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih-Piutang
jangka Panjang Rp0,00

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang per (Audated) **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) adalah sebagai berikut.

Rincian Penyisihan Piutang tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,50%	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Aset Lainnya Rp0,00

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang per (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp0,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah Rp0,00 dan Rp0,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Stasiun KIPM Palembang tidak mempunyai Aset Tak Berwujud pada Kantor Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 September 2025	0
Mutasi tambah dari SKIPM Palembang	0
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 September 2025	0
Amortisasi s.d 30 September 2025	0
Nilai Buku per 30 September 2025	0

Rncian Aset Tak Berwujud periode 30 September 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
	0
	0
Jumlah	0

Aset Lain-Lain Rp0,00

C.4.2 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain periode (*Audated*) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 September 2025	-
Akumulasi Penyusutan per 30 September 2025	
Nilai Buku per 30 September 2025	-

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp(0,00)

C.4.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya periode (*Audated*) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing Rp(0,00) dan Rp0,00 .Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya periode **30 September 2025** adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Kantor Stasiun KIPM Palembang Lainnya periode masing-masing (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah sebesar Rp132.883.500,00 dan Rp0,00

Kewajiban Jangka Pendek Ini terdiri dari Utang Pihak Ketiga Senilai Rp0,00, Utang Yang Belum ditagihkan senilai Rp16.0,00 dan uang Muka Ke KPPN senilai Rp0,00

Rincian Kewajiban Jangka Pendek :

Uraian	Nilai
Utang Kepada Pihak Ketiga Berupa Gaji PNS bulan September dan Gaji PPNNP Bulan September 2025	97.883.500
Utang yang belum ditagihkan Berupa Kwitansi yang belum di SPM kan	5.000.000
Uang Muka dari KPPN	30.000.000
Jumlah	132.883.500

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 dan Rp0,00 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga periode Lainnya periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar Rp97.883.500,00 dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus

Kewajiban Jangka
Pendek Rp0,00

Uang Muka dari KPPN
Rp30.000.000,00

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp97.883.500,00

dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Pihak Ketiga Periode **Audated 2025**, diantaranya :

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Pegawai yang masih harus di bayar Berupa Gaji PNS Bulan September 2025	97.883.500
2	Belanja Barang yang masih harus di bayar berupa gaji PPNPN Bulan September 2025	32.000.000
	Jumlah	129.883.500

Pendapatan Diterima di
Muka
Rp0,00

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Tidak ada Pendapatan Diterima di Muka pada Stasiun KIPM Palembang. Pendapatan Diterima di Muka per (*Audated*) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	Nilai
1	NIHIL	0
2		0
	Jumlah	0

Beban yang masih
harus dibayar
Rp304.815.577,00

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar periode (*Audated*) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** sebesar Rp304.815.577,00 dan Rp19.870.671,00 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga berupa Tagihan Listrik, PDAM, Telp dan Lagganan Internet Speedy, Uang Muka KPPN yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

30 September 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	30 September 2025	31 Desember 2024
Utang Kepada Pihak Ketiga	260.501.261	19.870.671
Utang yang belum ditagihkan	16.133.408	-
Uang Muka KPPN	28.180.908	-
Jumlah	304.815.577	19.870.671

C.5.5. Utang yang belum ditagihkan

Utang yang belum
ditagihkan
Rp16.133.408,00

Utang yang belum ditagihkan periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang sebesar Rp16.133.408,00 dan Rp0,00 berupa Kwitansi UP yang belum di SPM kan.

C.7. Ekuitas

Ekuitas
Rp18.566.609.432,00

Ekuitas periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar Rp 18.566.609.432,00 dan Rp4.649.920.47100. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB

Rp45.120.000,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah sebesar Rp45.120.000,00 dan Rp321.195.000,00 Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
periode 30 September 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	30 September 2025	30 September 2024	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	45.120.000	319.615.000	(85,88)
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	1.580.000	
Jumlah	45.120.000	321.195.000	(85,88)

Rincian saldo pendapatan PNB Per **31 Desember 2025** pada satuan kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Pendapatan PNB LO :			
1	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-
2	425289	Pendapat Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	45.120.000
3	425332	Pendapatan Jasa Karantina Ikan	-
4	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-
5	425911	Pendapatan Anggaran Lain-Lain TAYL	-
6	115211	Piutang PNB	-
7	115212	Piutang Lainnya	-
			45.120.000
Pendapatan PNB LRA :			45.598.500
Selisih :			(478.500)
Klarifikasi Selisih:			
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-
2	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-
3	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	-
4	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	-
5	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-
6	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	478.500
7	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-
Akrua PNB TAYL / Jurnal Balik			-
Akrua PNB Stasiun KIPM Palembang Posisi 30 September 2025			-
1		Piutang PNB	-
			478.500

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan/Jasa Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya senilai Rp45.120.000,00.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp4.559.776.716,00

Jumlah Beban Pegawai pada periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar Rp4.559.776.716,00 dan Rp3.481.343.882,00. Beban Pegawai tersebut berasal dari beban gaji PNS, beban tunjangan PNS yang meliputi (tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan fungsional dan tunjangan khusus/kegiatan) serta beban uang lembur.

Rincian Beban Pegawai periode **30 September 2025 dan 30 September 2024**

URAIAN JENIS BEBAN	30 September 2025	30 September 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1.795.031.200	1.382.310.000	22,99
Beban Pembulatan Gaji PNS	21.765	18.254	16,13
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	141.487.800	104.793.890	25,93
Beban Tunjangan Anak PNS	49.108.180	39.007.844	20,57
Beban Tunjangan Struktural PNS	21.000.000	10.800.000	48,57
Beban Tunjangan Fungsional PNS	49.560.000	91.540.000	(84,71)
Beban Tunjangan PPh PNS	14.580.397	12.199.707	16,33
Beban Tunjangan Beras PNS	102.257.040	81.544.920	20,25
Beban Uang Makan PNS	193.354.000	153.408.000	20,66
Beban Tunjangan Umum PNS	53.535.000	14.615.000	72,70
Beban Uang Lembur	126.346.000	103.651.000	17,96
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus Keg)	2.013.495.314	1.487.455.267	26,13
Jumlah	4.559.776.696	3.481.343.882	23,65
Pengembalian Tunjangan Umum PNS	555.000		
Pengembalian Pembulatan Gaji PNS	240	0	100,00
Grand Total	4.559.776.456	3.481.343.882	23,65

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp125.482.684,00,
-

Jumlah Beban Persediaan pada periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar Rp125.482.684,00 dan Rp213.543.800,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan periode (Audated) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30 September 2025	30 September 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	43.038.047	87.848.501	(104,12)
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-	-	#DIV/0!
Beban Bahan Baku	82.444.637	125.695.299	(52,46)
Beban Persediaan lainnya	-	-	100,00
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	125.482.684	213.543.800	(70,18)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa
Rp1.349.148.486,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode (Audated) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.349.148.486,00 dan Rp803.054.877,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode 30 September 2025 dan 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa posisi
periode (Audated) 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30-Sep-25	30-Sep-24	NAIK (TURUN) %
Beban Langganan Daya dan Jasa	102.953.310	106.916.064	(3,85)
Beban Sewa	55.000.000	0	100,00
Beban Jasa Profesi	0	0	#DIV/0!
Beban Jasa Lainnya	435.500.000	326.500.000	25,03
Beban Bahan	61.031.000	34.108.712	44,11
Beban Honor Output Kegiatan	1.360.000	1.346.400	1,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.000.000	3.500.000	(16,67)
Beban Keperluan Perkantoran	589.962.139	233.935.428	60,35
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	35.377.500	#DIV/0!
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	445.937	448.073	(0,48)
Beban Honor Operasional Satker	66.256.000	43.744.000	33,98
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid19			
beban Barang Oprasional Covid			
Beban Barang Operasional lainnya	33.319.100	17.178.700	48,44
Jumlah	1.348.827.486	803.054.877	40,46

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban

Pemeliharaan

Rp337.814.693,00

Beban Pemeliharaan periode (Audated) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.337.814.693,00 dan Rp.252.881.76,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 30 September 2025 dan 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Periode 30 September 2025 dan 30 September 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30 September 2025	30 September 2024
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	187.159.250	100.799.500
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150.244.563	151.744.240
Beban persediaan untuk pemeliharaan	410.880	338.000
Beban persediaan suku cadang	0	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan bangunan	0	0
Jumlah	337.814.693	252.881.740

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan

Dinas

Rp91.044.920,00

Beban Perjalanan Dinas periode (Audated) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp91.044.920,00 dan Rp226.931.825,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode (Audated) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
periode (Audated) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30 September 2025	30 September 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	88.644.920	170.301.825	-47,95
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000	56.630.000	-95,76
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	#DIV/0!
Jumlah	91.044.920	226.931.825	-59,88

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp0..00

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Pada satker Stasiun KIPM Palembang tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp0,00 untuk periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Beban Bantuan
Sosial Rp0,00

D.8 Beban Bantuan Sosial

Pada satker Stasiun KIPM Palembang tidak terdapat Beban Bantuan Sosial baik untuk periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp251.562.645,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar Rp251.562.645,00 dan Rp467.537.950,0 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode **30 September 2025 dan 30 September 2024** adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30 September 2025	30 September 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	77.525.966	343.834.571	-77,51
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	60.334.315	122.713.532	-141,65
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	4473296	989.855	86,03
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	-	-	0,00
Jumlah Penyusutan	142.333.577	467.537.958	-85,85
			0,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	0,00
Beban Penyusutan penyisihan piutang lainnya	-	-	0,00
Jumlah Amortisasi	-	-	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	142.333.577	467.537.958	-85,85

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0,00

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidakterttagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk **30 September 2025 dan 30 September 2024** adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Periode
(Audated) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30 September 2025	30 September 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	0	0	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban Lain-lain
Rp0.00

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode (Audated) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode (Audated) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain periode (Audated) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30 September 2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Extrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	-
Beban Aset Extrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	-
Beban Aset Extrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	-
Jumlah	0	0	-

D.12 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp(13.974.975),00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
Periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

URAIAN	30 September 2025	30 September 2025	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	-
Penadapatan dari kegiatan non opresional lainnya	-13.974.975	760.000	
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	0	0	-
Jumlah surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-13.974.975	760.000	-

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

URAIAN	30 September 2025	30 September 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas	0	-	-
Beban Persediaan	0	-	-
Jumlah	0	-	-

E . PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp4.649.920.471,0
0

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal periode 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.649.920.471,00 dan Rp16.802.020.178,00

Defisit LO

Rp(6.683.685.119,
00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada periode (*Audated*) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah sebesar Rp(6.683.685.119,00) dan Rp(5.123.339.088,00) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi Rp0,00

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai
Aset Rp0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada (*Audated*) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0,00

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode (*Audated*) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode (*Audated*) **31 Desember 2025** adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp.0,00

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Bahan Untuk Pemeliharaan	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-
Bahan Baku	-
Jumlah	-

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,00

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp2.344.806,00

E.4.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah sebesar Rp2.344.806,00 dan Rp100.590,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Periode Audated 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	2.344.806
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	2.344.806

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain
Rp0,00

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

E.5. Transaksi Atas Entitas

Transaksi Atas
Entitas
Rp20.597.111.274,
00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar Rp20.597.111.274,00,00 dan Rp4.427.377.513,00 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(45.598.500)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.135.929.613
Transfer Masuk	14.506.780.161
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	20.597.111.274

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga **31 Desember 2025**, DDEL berupa Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan standarisasi Lainnya (425289) sebesar Rp(45.598.500,00) sedangkan DKEL berupa realisasi netto sampai dengan **31 Desember 2025** sebesar Rp6.135.929.613,00

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal **31 Desember 2025** sebesar **Rp14.506.780.161,00** terdiri dari:

NO	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Transfer Masuk berupa Aset BMN	SKIPM Bandung	14.438.857.022
2	Persediaan Berupa Sertifikat HC	Transfer Masuk dari Sekretariat BPPMHKP	67.923.139
Jumlah			14.506.780.161

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pada Stasiun KIPM Palembang tidak terdapat akun Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung baik untuk periode (Audated) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**.

Ekuitas Akhir

Rp18.566.609.432,00

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada periode **31 Desember 2025** adalah masing-masing sebesar Rp18.566.609.432,00 dan Rp16.802.020.178,00.

F. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA :

F.1 Informasi Keuangan Tertentu

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d 31 Desember 2025

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d 30 Sep	Sisa Pagus.d. 30-Sep-2025	Rencana Realisasi Triwulan IV	Estimasi Total Realisasi	Estimasi PaguTidak Terealisasi
A	B	C	D	E	F (C+E)	G (B-F)
51	6.143.892.000	4.376.175.455	1.758.716.545	1.750.000.000	6.126.175.455	17.716.545
52	3.642.016.000	1.759.754.158	1.882.261.842	546.000.000	2.305.754.158	1.336.261.842
53						
57						
Total	9.785.908.000	6.135.929.613	3.640.978.387	2.296.000.000	8.431.929.613	1.353.978.387

a. Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi Stasiun KIPM Palembang

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, realisasi belanja barang sebesar Rp. 6.135.929.613 (62,76%). Serapan tersebut masih di bawah target penyerapan(<70%) disebabkan oleh adanya blokir efisiensi anggaran dan blokir penggunaan dana PNPB sebesar Rp. 1.333.998.000

Atas sisa pagu yang belum terealisasi sampai dengan triwulan III tahun 2025, direncanakan akan direalisasikan pada triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp. 2.296.000.000 dengan rincian sebagai berikut: *(belanja pegawai yang meliputi gaji, tunjangan kinerja, uang makan, uang lembur sebesar Rp. 1.750.000.000 dan belanja barang berupa pembayaran perjalanan dinas, belanja bahan, belanja honor, belanja langganan daya dan jasa serta belanja keperluan perkantoran sebesar Rp. 546.000.000).*

Dengan demikian, diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2025 total realisasi adalah sebesar Rp. 8.431.929.613 dan perkiraan pagu yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 1.353.978.387 dengan catatan blokir efisiensi anggaran tidak dilakukan penghapusan/pemotongan.

b. Informasi Pagu Minus Belanja Pegawai serta Rencana Mitigasi Stasiun KIPM Palembang

Jenis Belanja	Uraian	Pagu	Realisasi s.d. 30- Sep- 2025	Rencana Realisasi Triwulan IV	Total Realisasi	Estimasi Sisa Pagu/Pagu Minus
A	B	C	D	E	F (D+ E)	G (C –F)
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.143.892.000	4.376.175.455	1.750.000.000	6.126.175.455	17.716.545
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/ Polri					
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara					
5114	Belanja Gaji Dokter PTT					
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS					
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK					
5121	Belanja Honorarium					
5124	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito					

Sampai dengan Audated tahun 2025, terdapat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 1.758.716.545 dan diestimasikan sampai dengan akhir tahun 2025 terdapat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 17.716.545,00

c. Informasi Pagu Blokir Stasiun KIPM Palembang Periode s.d 31 Desember 2025

No.	Jenis Belanja	Pagu	Blokir Pagu	Rencana Buka Blokir	
				Rupiah	Tanggal
1	51	6.143.892.000	-		
2	52	3.642.016.000	1.333.998.000	65.930.000	2 Oktober 2025

Pada tahun 2025 terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp. 1.333.998.000. Sampai dengan triwulan III Tahun 2025, terdapat pembukaan blokir sebesar Rp.0 sehingga menyisakan pagu yang masih diblokir sebesar Rp. 1.333.998.000 (*blokir terdiri dari anggaran perjalanan dinas dan belanja yang bersumber dari dana PNB*).

2. Informasi Outstanding Kontrak Signifikan

a. Informasi Outstanding Kontrak Stasiun KIPM Palembang s.d 30 September 2025

No.	Satker	Jumlah Kontrak	NilaiTotal Kontrak	Realisasi	SisaNilaiKontrak
1	649732	NIHIL			
Total					

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, Tidak terdapat kontrak yang masih *outstanding*
Dengan nilai kontrak sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00

b. Informasi Outstanding Kontrak Signifikan s.d 30 September 2025

No	Kode Satker	No. Kontrak	Uraian Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	Nilai Kontrak	Realisasi	Sisa
1	649732		NIHIL					

Sumber: Aplikasi OMSPAN tanggal (disarankan 1-31 Desember 2025)

Berdasarkan *outstanding* kontrak signifikan tersebut diatas tidak terdapat kontrak Signifikan pada Satker kami.

b. Informasi Penting Lainnya

a. Kondisi

Program kegiatan yang tertagging menjadi Prioritas basional pada Satker Stasiun KIPM Palembang Tingkat penyerapan anggarannya masih sangat rendah yaitu sebesar 30,7 persen sampai dengan Audated tahun 2025. Jumlah Pagu anggaran kegiatan yang tertagging sebagai Prioritas Nasional pada Stasiun KIPM Palembang sebesar Rp517.000.00,00 dengan realisasi Rp,161.774.975,00 Kegiatan yang telah terealisasi yaitu UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan,

Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi, Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu, Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium, dan Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi.

c. Akun Signifikan pada Stasiun KIPM Palembang terdiri dari :

i. Kas di Bendahara Pengeluaran :

Saldo Kas di Bendahara pengeluaran tercatat sebesar 28.180.809,00 pada Audated 2025. Jumlah ini relatif kecil di bandingkan dengan total aset keseluruhan, namun penting krena mencerminkan operasional harian Satker yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin seperti perjalanan dinas, pengadaan bahan uji laboratorium, operasional kantor dan pemeliharaan peralatan dan mesin. Nilainya yang tidak terlalu besar menunjukkan pengelolaan kas yang efisien dan akuntabel.

ii. Bahan Baku :

Saldo bahan baku atau persediaan akhir tahun 2025 sebesar Rp.58.045.000,00, bahan baku ini umumnya berupa bahan uji laboratorium, bahan kimia padat atau bahan kimia cair. Nilai bahan baku ini relative kecil terhadap aset, namun memiliki peranan penting dalam menjaga kelancaran kegiatan pengujian . Persediaan yang terlalu rendah bisa menghambat kegiatan sementara persediaan yang terlalu besar bisa menyebabkan risiko kadaluarsa atau penurunan nilai.

iii. Peralatan dan Mesin :

Peralatan dan mesin merupakan komponen paling signifikan di Satker SKIPM Palembang dengan nilai mencapai Rp.10.016.000.000,00. Aset Tetap Peralatan dan Mesin ini mencakup Peralatan Laboratorium Uji Mutu, Peralatan dan Mesin pendukung kegiatan teknis dan perlengkapan lapangan.

Nilai yang besar ini menunjukkan bahwa kegiatan SKIPM Palembang sangat berbasis pada aset Fisik. Namun tingginya nilai aset tetap ini juga membawa tanggung jawab besar dalam hal pemeliharaan peralatan dan mesin berupa kalibrasi alat laboratorium dan pengawasan kondisi peralatan alat laboratorium.

iv. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan standarisasi Lainnya :

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) SKIPM Palembang pada periode Audated 2025 tercatat Rp.45.598.000,00 berasal dari kegiatan Layanan pengujian, pengujian sertifikasi dan kalibrasi. Jika dibandingkan dengan total belanja sekitar Rp.6.135.929.613,00 Kontribusi PNBP masih sangat kecil, artinya pendapatan layanan masih belum menjadi sumber utama pembiayaan kegiatan dan Satker masih sangat bergantung pada Dana DIPA dari pusat. Namun nilai ini juga bisa di baca sebagai peluang pengembangan potensi peningkatan PNBP dari layanan laboratorium, peningkatan kapasitas uji atau sertifikasi serta digitalisasi proses layanan .

INFORMASI KINERJA STASIUN KIPM PALEMBANG PERIODE AUDATED TA 2025

Kementerian/lembaga/Satker : Kementerian Kelautan dan Perikanan/BPPMHKP/SKIPM Palembang

Fungsi : Ekonomi

Subfungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri								
3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan								
3989.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk Perikanan yang Diawasi dan Diselesaikan Kasus Mutu Ekspor Impornya	5.000.000	0	0	1	0	Produk	0	Blokir
3989.PDC	Sertifikasi Produk	130.000.000							
3989.PDF	Produk Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang divalidasi Sertifikasi Lembaga	205.000.000	42.238.000	32,49	60	46	Sertifikat	76,67	
3989.QIA	Lembaga Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang divalidasi	25.000.000	49.753.000	24,27	30	26	Lembaga	86,67	
3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Produk Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	15.000.000	0	0	1	0	Laporan	0	Blokir
7010	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga UPI yang Konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5.000.000	5.000.000	33,33	15	13	Lembaga	86,67	
ABR.001	Manajemen Mutu	7.980.000							
DCC.001	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	7.000.000	0	0	1	0	Rekomendasi kebijakan	0	Blokir
PBR.001	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan Bimbingan Teknis Peningkatan Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	100.000.000	0	0	1	0	Kegiatan	0	Blokir
PDD.001	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan Rekomendasi Kebijakan	25.000.000							
PDD.002	Parameter Uji yang terakreditasi di Laboratorium Acuan dan Pengujian Sektor Kelautan Perikanan	35.000.000	40.783.975	40,78	1	0	Rekomendasi kebijakan	0	Blokir
QIA.001	Standarisasi Lembaga Unit kerja yang menerapkan	7.000.000							

3987	Standar Sistem Pengujian Mutu	1.500.000	6	1	0				Blokir
	Unit kerja yang menerapkan								
	Sistem Manajemen Mutu	22.500.000	64,29	1	0	Lembaga			Blokir
	Laboratorium					Lembaga			
3987.EBA	Pengawasan dan Pengendalian								
	Produk								
	Unit/Usaha Perikanan yang		0	0	1	0	Produk		Blokir
	menerapkan Quality Assurance	198.000.000							
	sesuai standar, sistem dan								
	regulasi	8.878.928.000							
3987.EBD	Program Dukungan Manajemen								
	Manajemen Mutu	100.800.000							
	Dukungan Manajemen Internal	37.200.000							
	lingkup BPPMHKP								
	Layanan Dukungan Manajemen	38.615.525	19,5	1	0	Layanan			Blokir
	Internal								
	Layanan Umum	5.916.587.958	66,64	1	0	Layanan			Blokir
	Layanan Perkantoran								
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	19.506.395	19,35	1	0	Dokumen			Blokir
	Layanan Perencanaan dan								
	Penganggaran								
	Layanan Manajemen Keuangan					Dokumen			Blokir
	Subtotal	9.776.908.000							
			6.136.484.853						
	Penyesuaian(Revisi								
	DIPA/Pengembalian Belanja/dll.)*								
	Total	9.776.908.000							
			6.136.484.853						

Prioritas Nasional 02 – Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan Mendorong kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.

Pelaksanaanya diantaranya melalui 1 program, 8 kegiatan prioritas yang tersebut di 1 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp.542.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.161.774.975,00, dengan rincian sebagai berikut :

Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri							
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	130.000.000	42.238.000	32,49	Produk	60	46	76,67
Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	205.000.000	49.753.000	24,27	Lembaga	30	26	86,67
Hasil Perikanan di wilayah RI yang	25.000.000			Produk	1	0	0

diawasi mutunya	0						
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	15.000.000	5.000.000	33,33	Lembaga	15	13	86,67
Manajemen Mutu							
Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	100.000.000	40.783.975	40,78	Rekomendasi kebijakan	1	0	0
Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	25.000.000	1.500.000	6	Lembaga	1	0	0
Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	35.000.000	22.500.000	64,29	Lembaga	1	0	0
Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	7.000.000	0	0	Produk	1	0	0

G . PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

G.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada Periode 31 Desember 2025 hasil temuan Koreksi dari Tim BPK RI maupun tim dari APIP Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Pelaporan Keuangan sudah ditindaklanjuti dan disetorkan ke Kas Negara.

G.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

G.2.1 Penjelasan Anggaran Prioritas Nasional (PN) TA 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan Kode 01 dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP, dengan Rincian Pagu Rp. 1.409.500.000,00 dan realisasi Rp91.227.979,00 atau 6,47 % dan masih terdapat kegiatan yang belum terlaksanakan, dikarenakan anggaran terkena blokir automatic adjustment (AA)., dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Penjelasan terkait Anggaran Prioritas Nasional TA 2025 :

Kode	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%
3989.PDC.001	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	45.000.000	13.345.000	29,66%	Sertifikat	60	120	200,00%
3989.QIA.001	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	78.500.000	35.557.599	45,30%	Produk	3	3	100,00%
3989.QIC.001	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	6.440.000	3.042.000	47,24%	Lembaga	10	6	60,00%

Kode	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%
3989.QIC.002	UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	76.560.000	39.283.380	51,31%	Lembaga	15	15	100,00%
3990.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter Uji yang Terakreditasi di Laboratorium Acuan dan Penguji Sektor Kelautan dan Perikanan	80.000.000	-	0,00%	Rekomendasi Kebijakan	1	-	0,00%
3990.PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	25.000.000	-	0,00%	Lembaga	1	-	0,00%
3990.QDC.001	Masyarakat yang meningkatkan pemahamannya terhadap sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan	980.000.000	-	0,00%	Orang	440	-	0,00%
3990.QIA.001	Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	118.000.000	-	0,00%	Produk	2	-	0,00%
Jumlah		1.409.500.000	91.227.979					

G.2.2 Penjelasan Terkait Program Tematik APBN TA 2025 :

Program Tematik APBN di Stasiun KIPM Palembang adalah Anggaran Responsif Gender melalui kegiatan Unit Kerja yang menerapkan standar pelayanan publik dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tema	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRO	RVRO	%
1	003 Anggaran Responsif Gender	HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	3990 Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	ADD Standardisasi Lembaga (Lembaga, Unit Kerja)	001 Unit Kerja yang menerapkan standar pelayanan publik (Lembaga)	12.500.000	0	1	0	0
2	003 Anggaran Responsif Gender	HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	3990 Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	001 Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan (Orang)	980.000.000	0	440	0	0

Pada Periode 30 September 2025 Program Tematik APBN masih terdapat kegiatan yang belum terlaksanakan, dikarenakan anggaran terkena blokir automatic adjustment (AA).

G.2.3 Penjelasan PNBPN Posisi 31 Desember 2025 Stasiun KIPM Palembang :

Masih belum tercapainya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Periode 31 Desember 2025 di sebabkan :

1. Penurunan lalu lintas Ekspor komoditi perikanan yang disebabkan karena kurangnya bahan baku produk dan persyaratan tambahan oleh negara tujuan ekspor baik yang terkait food safety maupun yang non food safety (administrative dan financial);
2. Penerapan Tariff PNBPN lalulintas media pembawa domestic Rp.0,00 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Ketersediaan bahan pengujian sampel parameter uji tertentu yang tidak terpenuhi.

G.2.4 Pengawasan Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Posisi 31 Desember 2025 :

Pengawasan Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Periode 31 Desember 2025 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang, mempunyai akun- akun signifikan, diantaranya :

UNIT KERJA	KODE AKUN	URAIAN AKUN
649732 - STASIUN KIPM PALEMBANG	116111	Kas di Bendahara Pengeluaran
	117131	Bahan Baku
	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, dan Standarisasi Lainnya
	132111	Peralatan dan Mesin
	511151	Tunjangan Umum

Data pendukung PIPK terlampir di drive sebagai berikut :

https://drive.google.com/drive/folders/1stG-_OhOaWvhQUfA3KQAmh-C4i1jbu7J?usp=sharing

G.2.5 Penetapan Status Penggunaan BMN Per 31 Desember 2025:

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaanya pada Stasiun KIPM Palembang per **31 Desember 2025** adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	14.367.394.000	
2	Peralatan dan Mesin	10.016.180.087	-
3	Gedung dan Bangunan	4.319.820.701	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	197.879.014	
5	Aset Tetap Lainnya	32.290.000	
6	Aset Tak Berwujud		
	Jumlah	28.933.563.802	-

Aset Barang Milik Negara (BMN) posisi per **31 Desember 2025 sudah** ditetapkan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP-BMN) sebesar Rp28.933.563.802,00.